

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 265–79.
- Azis, Abdul, Aan Handriani, and Herlina Basri. "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (2019): 59–74.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Accessed June 10, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Bakhri, Saiful. "Peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Kesejahteraan Pekerja Di Masa Mendatang Pada Program BPJS Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 9, no. 3 (2023): 327–34.
- Cantik Nur Annisa, Ollyvia. "Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja." *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 129–43.
- Dian Rahayu. "Perusahaan Pailit, Gaji Belum Dibayar, Eks Buruh Pabrik Sepatu Di Pilangkenceng Tuntut Keadilan." *Jawa Pos*, 2024. <https://radarmadiun.jawapos.com/kab-madiun/804385025/perusahaan-pailit-gaji-belum-dibayar-eks-buruh-pabrik-sepatu-di-pilangkenceng-tuntut-keadilan>.

- Faisal, Faisal, Saprudin Saprudin, and Yulia Qamariyanti. "Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023).
- Hafizh Izzulhaq, Muhammad. "Hak Upah Pekerja Atas Perusahaan Pailit: Disharmonisasi Peraturan Undang-Undang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Kertha Semaya* 12 (2023): 3121–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p09>.
- Hisbulloh, Moh Hamzah, and Ruslina Dwi Wahyuni. "Deregulasi Hak Upah Dan Pesangon Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 67–80.
- Isnaeni, Diyan. "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 1, no. 1 (2018): 35–46.
- Ketenagakerjaan, BPJS. "3 Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan." Accessed June 27, 2024. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kehilangan-pekerjaan.html>.
- Kholiq, Abdul. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (2018).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).
- Kurniawan, Ryan. "Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke

Lima.” *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 01 (2013): 687–704.

Mesra, Romi, Rus Yandi, Rifka Zuwanda, Basrial Zuhri, and Afriendi Sikumbang.

“Persepsi Masyarakat Bidar Alam Tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak Dengan Pemilik Lahan.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 4 (2022).

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

Octavian, Verri, and Pandi Septiawan. “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok.” *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 243.
<https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17760>.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (2021).

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Sekretariat Negara § (2021).

———. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sekretariat Negara § (n.d.).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sekretariat Negara

§ (2004).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Sekretariat Negara § (2023).

Puspita Sari, Iustika, Ahyuni Yunus, Abstrak Kata kunci, and Berdasar Pada Timbulnya Hak Dan Kewajiban Antara Pengusaha Dan Pekerja Yang Dituangkan Dalam Perjanjian Kerja Sebagai Perikatan Yang Kuat Untuk Pemenuhan Hak Dan. “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit.” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2019, 403–13. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03>.

R. Joni, Bambang S. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Safitri, Kiki, and Erlangga Djumena. “Jumlah Perusahaan Pailit Masih Tinggi, Pemulihan Ekonomi RI ‘On Track’?” Kompas.com. Jakarta, October 18, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/10/18/204000726/-jumlah-perusahaan-pailit-masih-tinggi-pemulihan-ekonomi-ri-on-track-?page=all>.

Santosa, A A Gede D H. “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–66.

Susetiyo, Weppy, and Anik Iftitah. “Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja.” *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 92–106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.

Turnip, Eloi, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. “Penyusunan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 14–18.

Widjaja, Gunawan. “Hal-Hal Prinsip Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Yang Sering Terlupakan Dan Akibat-Akibatnya.” *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis Prinsip Dalam Hukum Kontrak Dan Asas Proporsionalitas, Proporsionalitas, Pengembang Hukum Bisnis*, Hlm 52 (2010).